



Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



Ditjen Badilum



badilum.mahkamahagung.go.id

PROFIL PIMPINAN

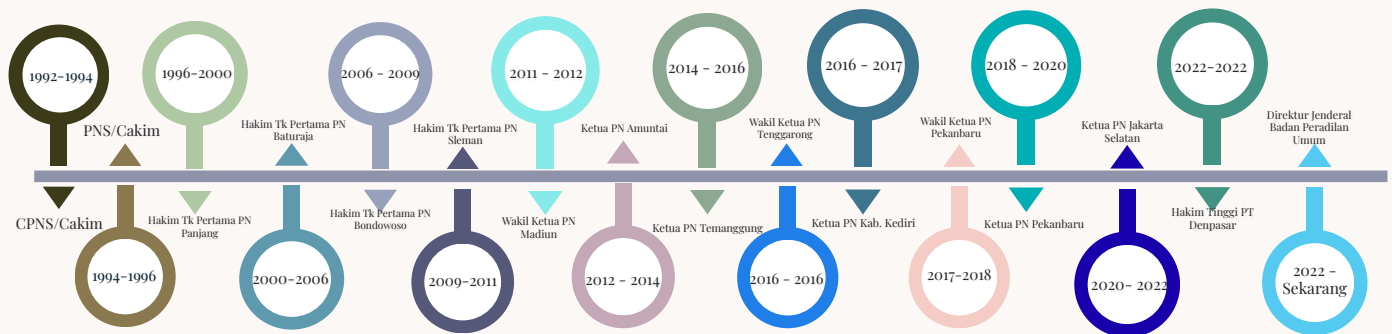
Badilum

H. Bambang Myanto

*Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum*



Lahir di Kebumen, 23 Mei 1968. Mengawali karir Calon Pegawai Negeri Sipil/ Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon pada 1992 - 1994 dan Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Hakim di Pengadilan Negeri Cirebon. pada 1996. pertama kali menjadi Hakim pada tahun 1996 di Pengadilan Tingkat Pertama di pengadilan Negeri Panjang, berpindah tempat beberapa kali sebelum menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Madiun pada Tahun 2011, beberapa jabatan seperti Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar hingga pada 18 Mei 2022 dilantik menjadi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Oleh ketua Mahkamah Agung RI, secara lengkap perjalanan karir sebagai berikut:



PROFIL PIMPINAN ESELON II

Badiluh



Kurnia Arry Soelaksono

*Sekretaris Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum*

Hasanudin

*Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
Peradilan Umum*



Zahlisa Vitalita

*Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Umum*

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

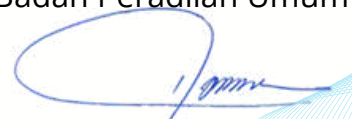


Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai unit eselon I di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai capaian kinerja, realisasi anggaran, serta berbagai upaya perbaikan dan inovasi yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus berupaya mendorong terwujudnya peradilan yang modern, responsif, dan berintegritas. Berbagai program prioritas telah dilaksanakan, antara lain penguatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi transformasi digital peradilan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan pengawasan dan pembangunan zona integritas. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah menjadi bagian dari proses untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan refleksi atas pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan agar kinerja organisasi semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran peradilan umum serta para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai upaya peningkatan kinerja peradilan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto



SELAMAT & SUKSES

Terima Kasih dan Apresiasi Setinggi-tingginya
Kepada Satuan Kerja yang telah Memperoleh
Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi
Tahun 2025

NO	SATUAN KERJA	WILAYAH HUKUM	PREDIKAT
1	Pengadilan Tinggi Makassar	PT Makassar	WBK
2	Pengadilan Negeri Bangli	PT Denpasar	WBK
3	Pengadilan Negeri Bengkalis	PT Riau	WBK
4	Pengadilan Negeri Marabahan	PT Kalimantan Selatan	WBK
5	Pengadilan Negeri Purwakarta	PT Jawa Barat	WBK
6	Pengadilan Negeri Sekayu	PT Sumatra Selatan	WBK
7	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	PT Riau	WBK



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

2022 - SEKARANG

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
2019 - 2022

DR. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.
2014 - 2019

CICUT SUTRIARSO, S.H., M.HUM.
2013 - 2008

M. HATTA ALI, S.H., M.H.
2005 - 2005

SOEJATNO S.H.
2000 - 2005

H. PARMAN SOEPARMAN S.H.
1997 - 2000

SOELISTYOWATI SOEGONDO S.H.
1992 - 1997

ZAKIR S.H.
1988 - 1992

ROESLI S.H.
1982 - 1988

SOEROTO S.H.
1975 - 1982

R. HADI POERNOMO S.H.
1970 - 1975



Visi

Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung

Misi

01

Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum;

02

Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Umum;

03

Meningkatkan Transformasi Digital Manajemen Pelayanan yang Berkeadilan;

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEADAAN PERKARA PERADILAN UMUM	2
A. Keadaan Perkara	3
B. Penyelesaian Perkara	7
C. Program Prioritas Nasional	10
17 BAB III SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	
18 A. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	
21 B. Data Hakim	
25 C. Kepaniteraan	
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	28
A. Pengelolaan Keuangan	29
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	31
C. Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Teknologi Informasi	32

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 33

- A. Indek Kepuasan Masyarakat 34
 - B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 35
 - C. Inovasi Pelayanan Publik 37
 - D. Abhinaya Upangga Wisesa 40
-

BAB VI PENGAWASAN 40

Internal 41

Evaluasi 42

BAB VII PENUTUP 43



TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BADILUM

TUGAS

Membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata, tatalaksana perkara di lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

FUNGSI

1

Penyiapan Perumusan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan peengadilan di lingkungan peradilan umum;

2

Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan peradilan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3

Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan Umum;

4

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;

5

Pelaksanaan Administrasi Direktorat Jenderal

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran strategis dibidang yudikatif. Sebagai Unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bertanggung jawab dalam pembinaan tenaga teknis dan administrasi peradilan umum pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh wilayah Indonesia.



Laporan Pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Badilum Tahun 2025 juga untuk mendukung kebijakan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas aparatur peradilan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelayanan perkara.

Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam penguatan transformasi layanan peradilan berbasis digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur peradilan, serta penguatan sistem pembinaan internal guna menjaga akuntabilitas, transparansi dan integritas peradilan. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan mencakup pembinaan teknis yudisial, pengelolaan administrasi perkara, peningkatan sarana dan prasarana, monitoring dan evaluasi kinerja satuan kerja, serta penguatan tata kelola organisasi.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Badilum Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan anggaran yang telah dilaksanakan selama satu periode pelaporan. Laporan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi kendala dan tantangan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Badilum pada Tahun 2025 serta menjadi bahan masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pada tahun berikutnya.



BAB II

KEADAAN PERKARA

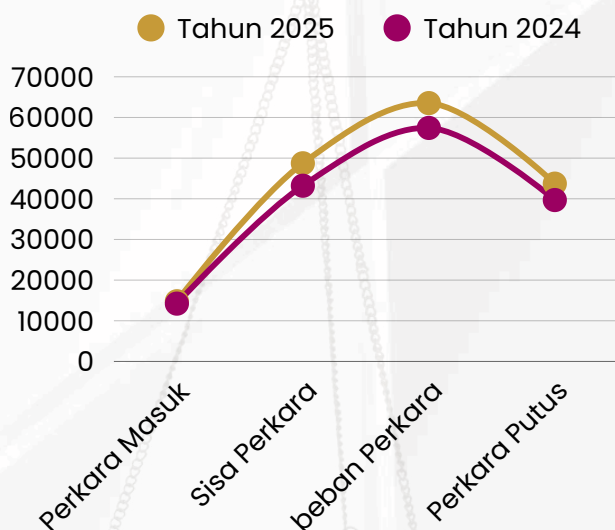
PERADILAN

UMUM TAHUN 2025

Statistik Perkara

Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tahun 2025

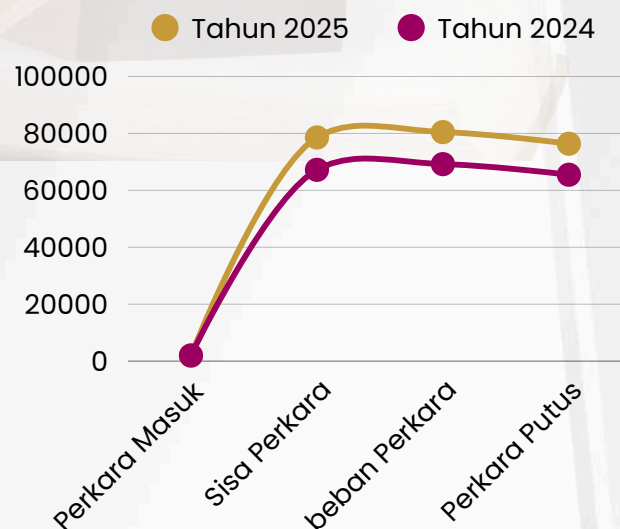
Perkara Gugatan



Presentase Penyelesaian Perkara Gugatan pada Tahun 2025 sebesar 68 %. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara 69% sehingga pada tahun 2024 presentase penyelesaian perkara menurun 1 %

Presentase Penyelesaian Perkara Permohonan pada Tahun 2025 sebesar 94 %. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara 94 % sehingga pada tahun 2024 presentase penyelesaian perkara sama.

Permohonan



A. Keadaan Perkara

Tingkat Pertama

Tabel Jumlah Perkara Berdasarkan Jenis Perkara

Perkara Perdata

No	Perkara	Sisa Awal	Masuk	Cabut	Jumlah	Putus	Banding	Kasasi	PK	Grasi	
1	Gugatan	14.800	48.732	3.154	60.377	43.730	8.568	5.453	1.679	0	
2	Permohonan	1.881	78.584	1.866	78.599	76.373	0	93	0	0	
3	Gugatan Sederhana	654	7.597	612	7.639	7.077	0	0	0	0	
4	Bantahan/ Perlawanan	642	1.552	155	2.039	1.300	600	430	90	0	
5	Kepailitan	23	125	19	129	104	0	20	3	0	
6	PKPU	157	615	81	691	510	181	28	0	0	
7	HAKI	61	184	6	239	163	0	82	9	0	
8	PHI	<150 JT	334	1.461	52	1.743	1.359	0	749	0	0
		>150 JT	234	787	22	999	764	0	456	0	0
Total		18.786	139.637	5.967	152.455	131.380	9.349	7.311	1.781	0	

Tabel Jumlah Perkara Berdasarkan Jenis Perkara

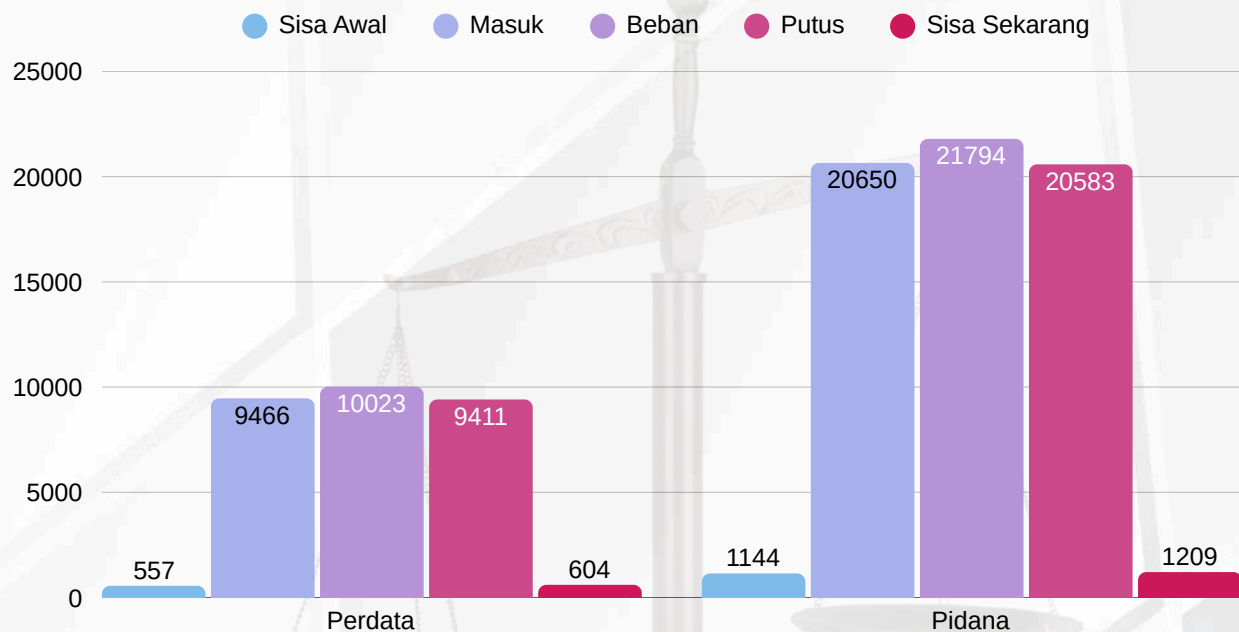
Perkara Pidana

No	Perkara	Sisa Awal	Masuk	Jumlah	Putus	Banding	Kasasi	PK	Grasi
1	Pidana Biasa	22.536	120.310	142.846	117.413	20.396	13.942	5.142	59
2	Pidana Singkat	3	106	109	109	10	4	1	0
3	Pidana Cepat	0	13.411	13.411	13.410	44	2	0	0
4	Tipikor	740	2.544	3.284	2.222	2	8	190	2
5	Perikanan	0	40	40	39	7	2	0	0
6	Pidana Anak	665	4.545	5.210	4.503	511	294	8	0
7	Praperadilan	141	1.844	1.985	1.732	0	0	0	0
8	Lalu Lintas	0	1.891.788	1.891.788	1.891.788	0	0	0	0
Total		24.085	2.034.588	2.058.673	2.031.216	20.970	14.252	5.341	61

Data Perkara

Tingkat Banding

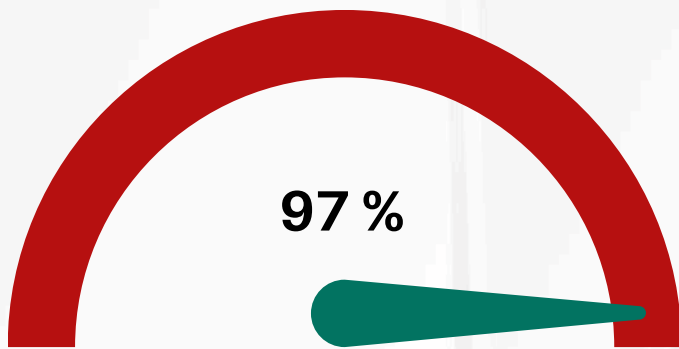
Tabel Perkara Tingkat Banding



Jumlah Perkara yang dicabut pada Perkara tingkat Banding pada Tahun 2025 sebanyak 8 (delapan) perkara perdata dan 0 (nol) pada perkara pidana.

B. Penyelesaian Perkara

1. Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu



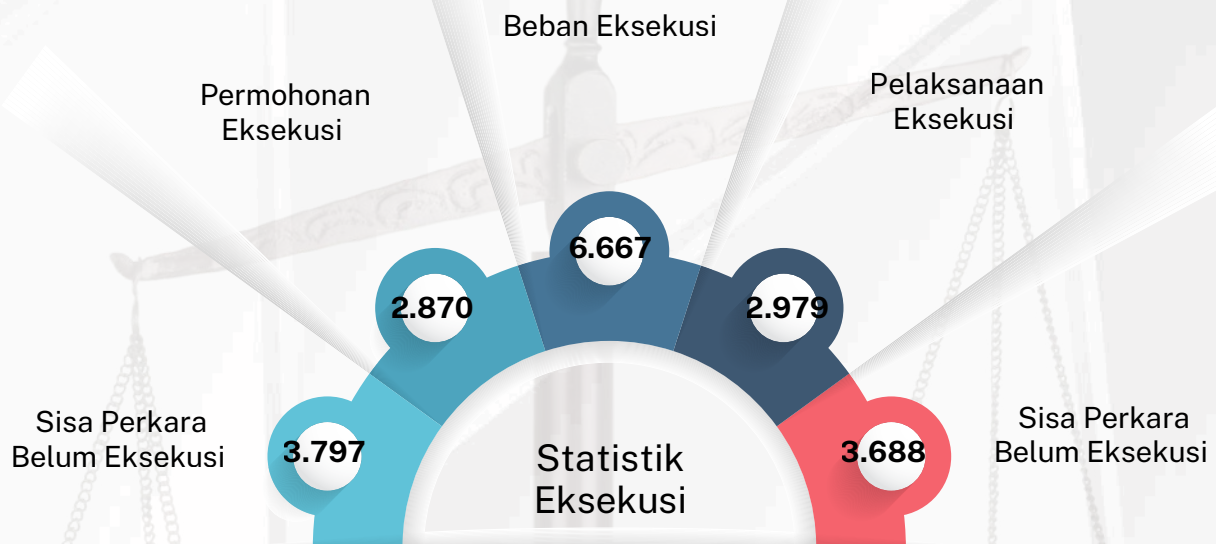
Ketepatan Penyelesaian Perkara

Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum Berdasarkan 4 Indikator:

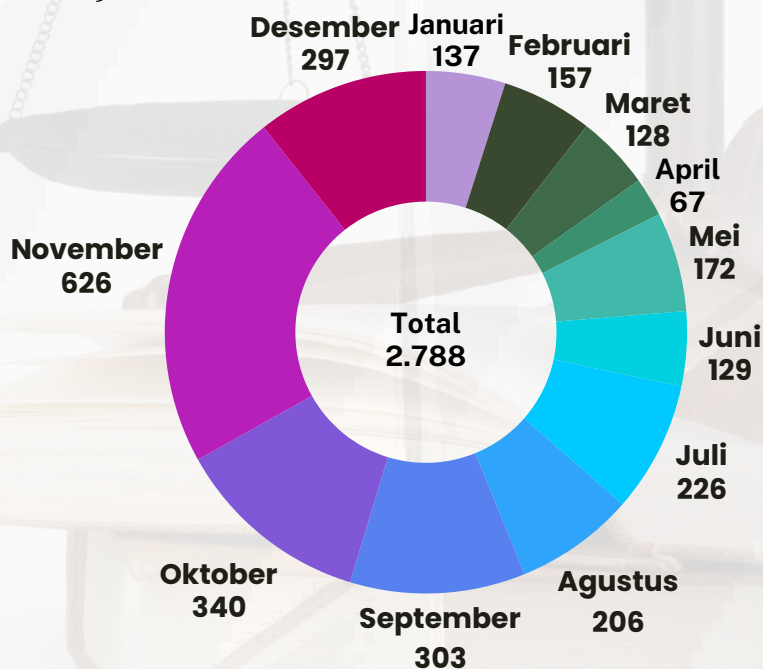
1. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding secara tepat waktu;
2. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana, Pidana Korupsi, PHI, Gugatan dibawah 150 Juta Tk. Pertama secara tepat waktu;
3. Persentase penyelesaian Perkara Perdata tepat waktu Pengadilan Tk. banding;
4. Persentase Penyelesaian Perkara Perdata tepat waktu Tk. Pertama.



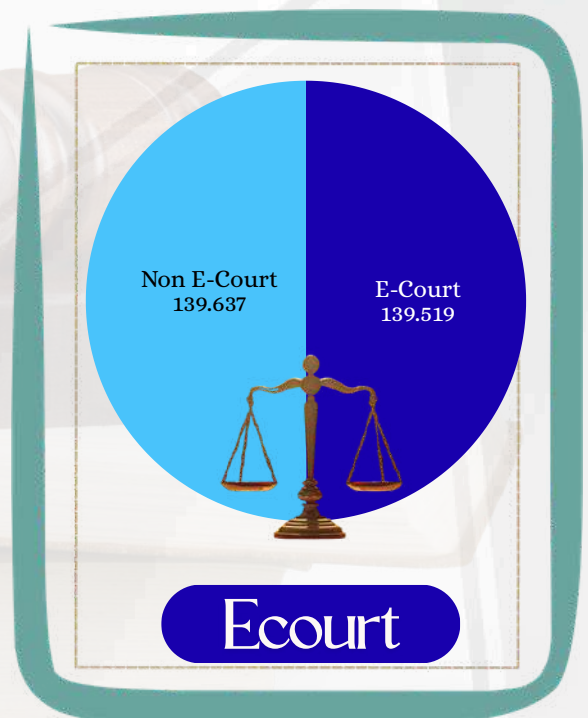
2. Penyelesaian Permohonan Eksekusi



3. Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan Restorative Justice



4. Perkara Perdata Menggunakan E-court



5. Perkara Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi

Sepanjang Tahun 2025, Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan peradilan secara konsisten melaksanakan proses mediasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan pemeriksaan perkara. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa melalui pendekatan musyawarah, mengurangi beban perkara yang harus diputus melalui proses litigasi, serta mempercepat penyelesaian perkara secara keseluruhan.

Ditjen Badilum terus melakukan penguatan terhadap kapasitas hakim mediator dan mediator non-hakim melalui pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan mediasi, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi penelusuran perkara untuk mendukung tertib administrasi mediasi.

Berhasil



2.543

Tidak Berhasil



21.668

Tidak dapat dilaksanakan



696

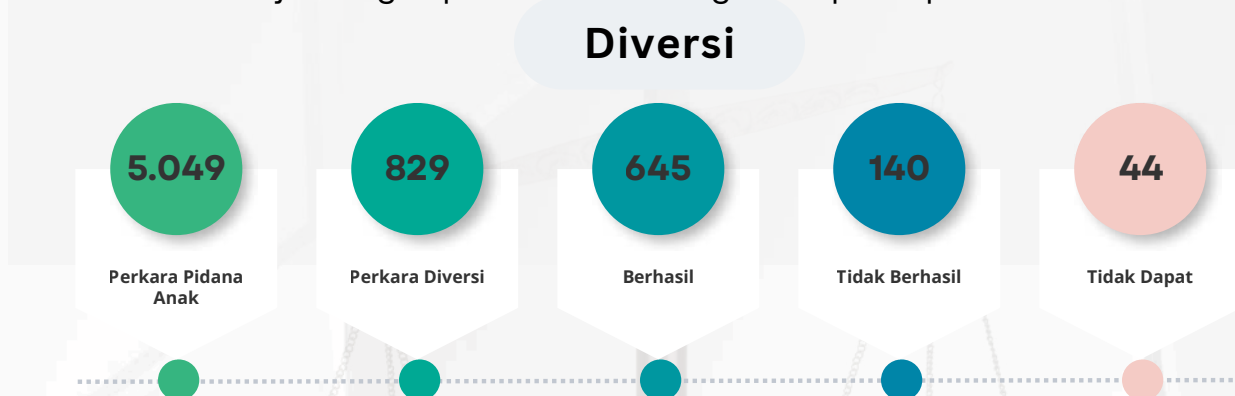
Dalam Proses



1.600

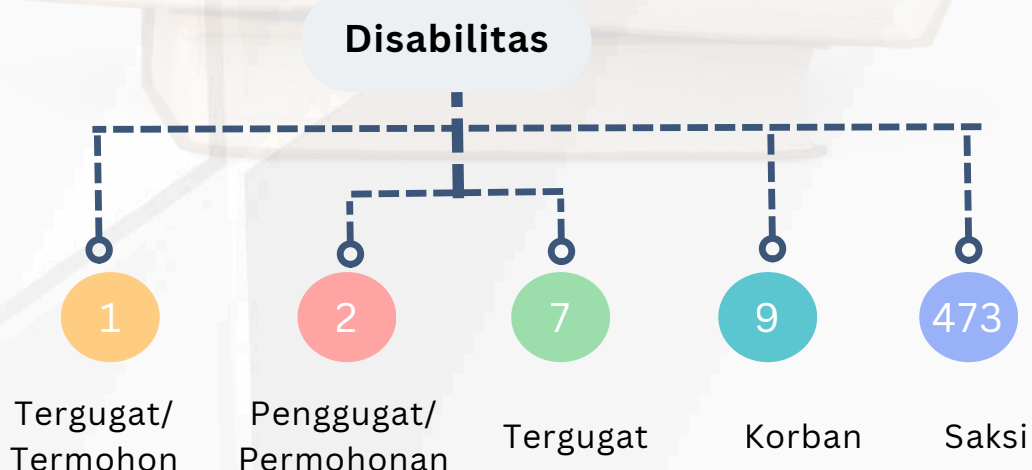
6. Perkara Anak berhasil Diselesaikan Melalui Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. peradilan umum melalui pengadilan negeri berkewajiban mengupayakan diversi terhadap perkara anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan/atau orang tua/wali, korban dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak terkait lainnya dengan pendekatan dialogis dan partisipatif.



7. Kemudahan Akses bagi Penyandang Disabilitas

Pemenuhan hak dan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas pada lingkungan peradilan umum merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan peradilan yang inklusif, setara, dan tidak diskriminatif. Ditjen Badilum telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas, antara lain penyediaan sarana dan prasarana ramah disabilitas. Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dioptimalkan untuk mendukung akses layanan, termasuk melalui sistem informasi perkara dan layanan elektronik yang dapat diakses secara daring. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan hambatan mobilitas serta meningkatkan kemandirian para pencari keadilan penyandang disabilitas.

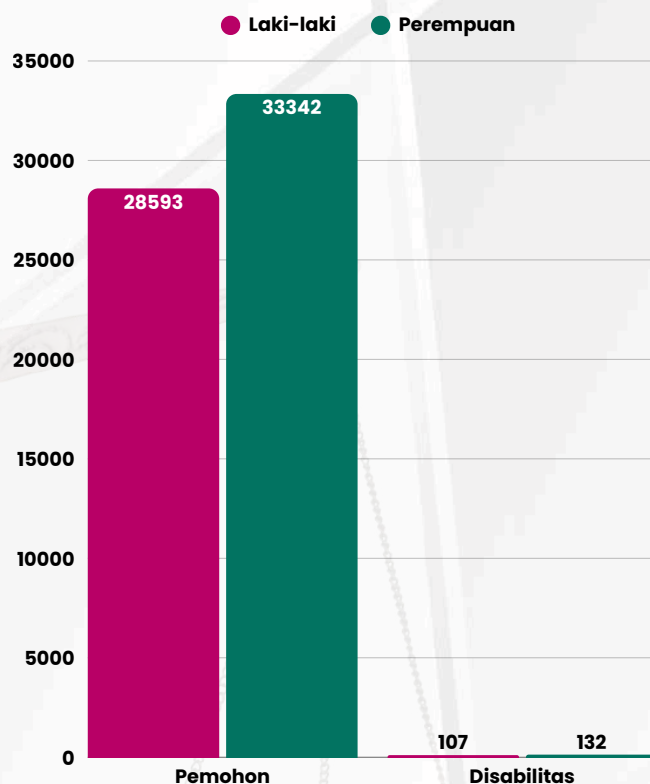


C. Program Prioritas Nasional



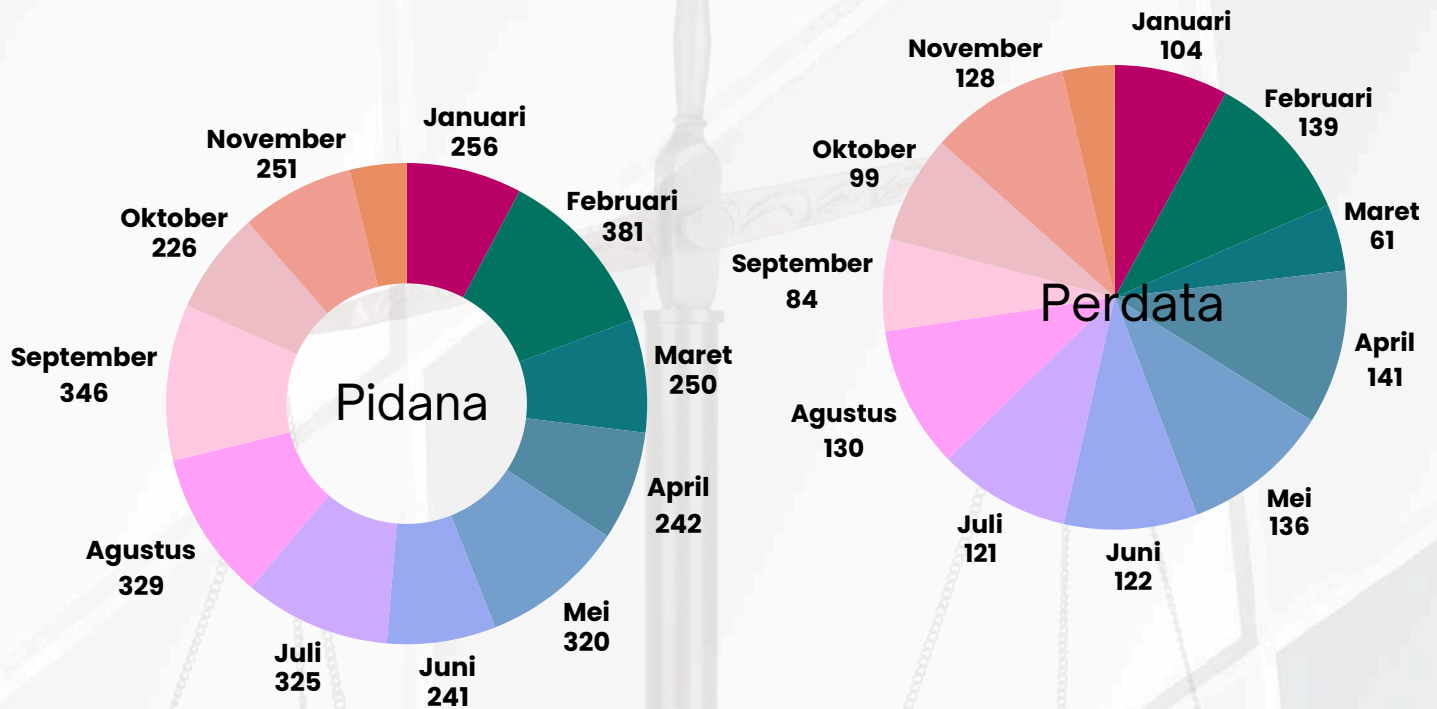
1. Pos Bantuan Hukum

Pelayanan Posbakum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Layanan bantuan hukum bertujuan untuk memberikan akses keadilan dan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dalam menghadapi permasalahan hukum. Layanan Bantuan Hukum atau Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan yang lengkap dan akurat, cepat dan mudah.



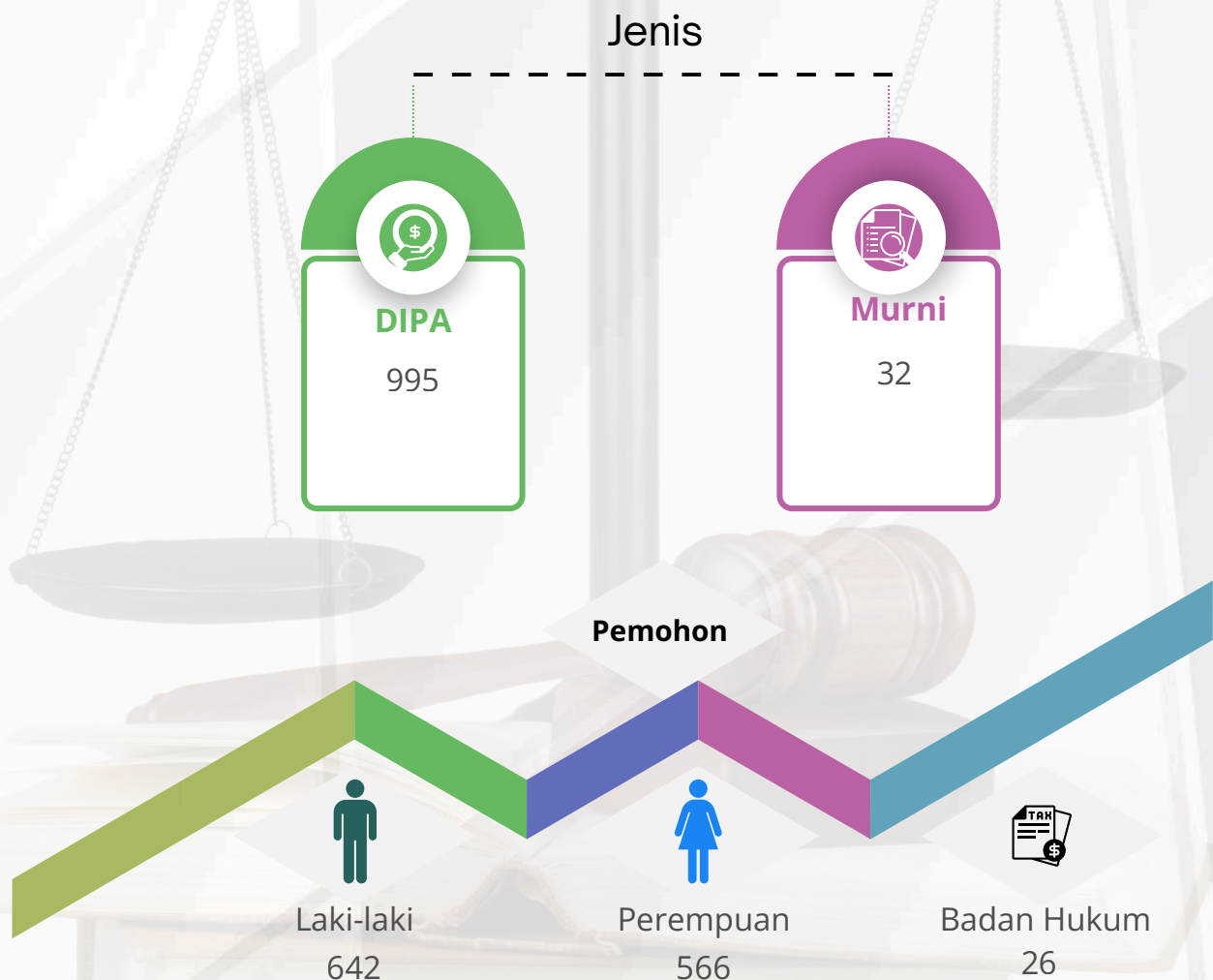
2. Sidang Diluar Gedung Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri bertujuan untuk mendekatkan akses keadilan, memberikan pelayanan hukum cepat dan ringan serta membantu Masyarakat kurang mampu, dapat dilihat pelayanan sidang keliling berdasarkan perkara Tahun 2025.



3. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Pelayanan perkara prodeo merupakan salah satu bentuk komitmen peradilan dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Kebijakan ini memberikan pembebasan biaya perkara kepada para pencari keadilan yang secara ekonomi tidak mampu, sehingga keterbatasan finansial tidak menjadi hambatan dalam memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Pembebasan biaya Perkara (Prodeo), layanan berperkara di pengadilan secara cuma-suma bagi masyarakat tidak mampu, dibiayai oleh negara melalui DIPA Mahkamah Agung R.I. yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 Layanan Bantuan Hukum diambil dalam jangka waktu satu tahun dengan berbagai golongan, berdasarkan:



Jenis Perkara Prodeo

Jenis Perkara	Jumlah Perkara
Perdata Gugatan	166
Perdata Gugatan Sederhana	4
Kepailitan	0
Perdata Perlawanan	0
Perdata Permohonan	789

4. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH)

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 menjelaskan tentang perlakuan adil terhadap perempuan yang mengalami permasalahan hukum. Sehingga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selalu memberikan bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum sudah memberikan bimbingan teknis kepada 241 Hakim pada tahun 2025, dengan rincian:

Pelatihan	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)	Semarang	24 - 26 Februari 2025	105
	Jakarta	15 - 17 September 2025	35
	Jakarta	11 - 13 November 2025	100



BAB III

Sumber Daya Manusia

2025



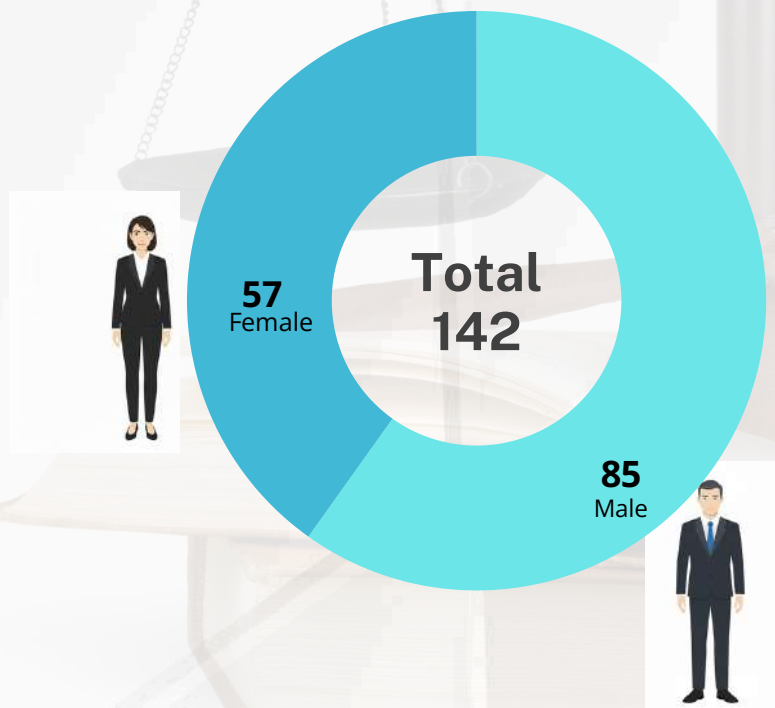
Sumber Daya Manusia Ditjen. Badilum

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Daftar jumlah Pegawai pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2025 :

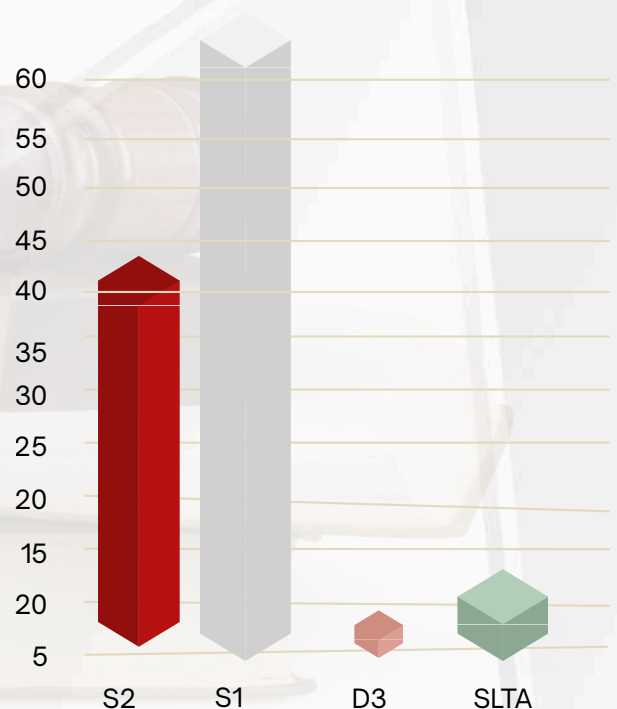


Golongan/Ruang

Gender PNS

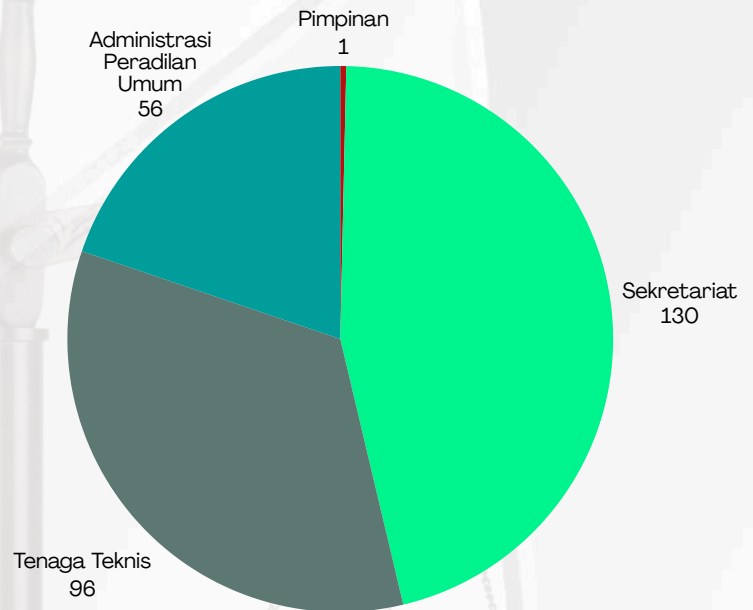


SDM Berdasarkan Pendidikan

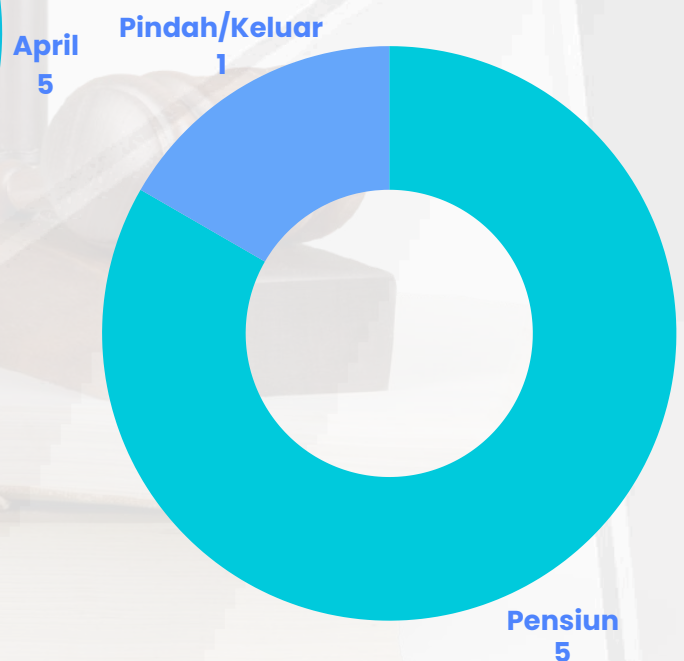
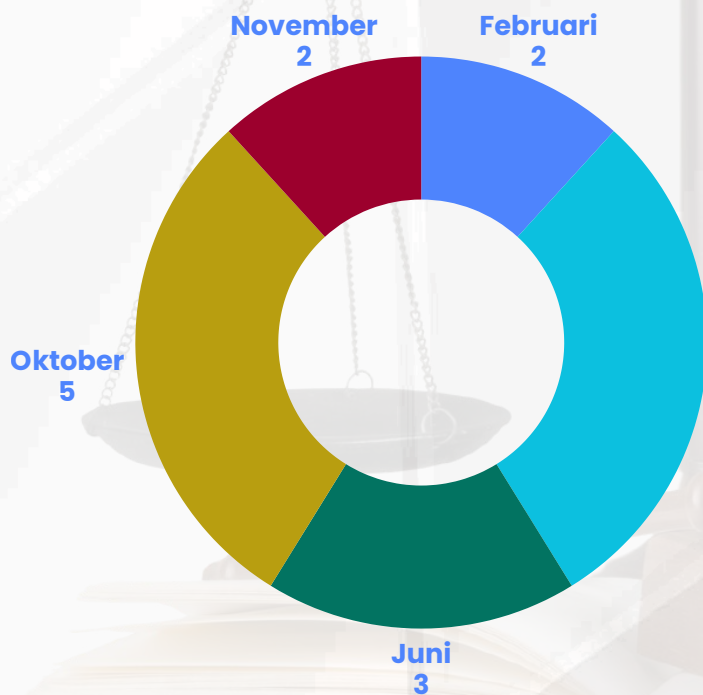


Terdapat 3 Kekosongan Jabatan pada Eselon III sebanyak 2 (dua) dan eselon IV sebanyak 1 (satu) pada Direktorat Tenaga Teknis, serta 1 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Berdasarkan Bagian



Kenaikan Pangkat



Pensiun, Meninggal dan Keluar

Pada Tahun 2025 Ditjen badilum berupaya melakukan peningkatan kompetensi SDM dengan melaksanakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pembinaan berkelanjutan bagi aparatur peradilan.

Pelatihan, Diklat dan Asessmen

No	Kegiatan		Jumlah Peserta
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)		3 Orang
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)		6 Orang
3	Pelatihan Public Speaking		39 Orang
4	Pelatihan Petugas PTSP	Service Exelent	39 Orang
		Disabilitas	21 Orang
5	Kegiatan Penilaian Kompetensi		13 Orang
6	Penguatan Sistem Merit, Pengembangan Talenta dan Karir PNS		29 Orang
7	Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) Tahun 2025 Gelombang II Tahap 1 dan 2		3 Orang
8	Pelatihan Menegemen Resiko Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Satker	416 Satker
		Pegawai Ditjen Badilum	55 Orang
9	Sosialisasi Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Satker	416 satker
		Pegawai Ditjen Badilum	51 Orang
10	Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas	Satker	416 Satker
		Pegawai Ditjen Badilum	142 Orang

Data Hakim 2025



3.168

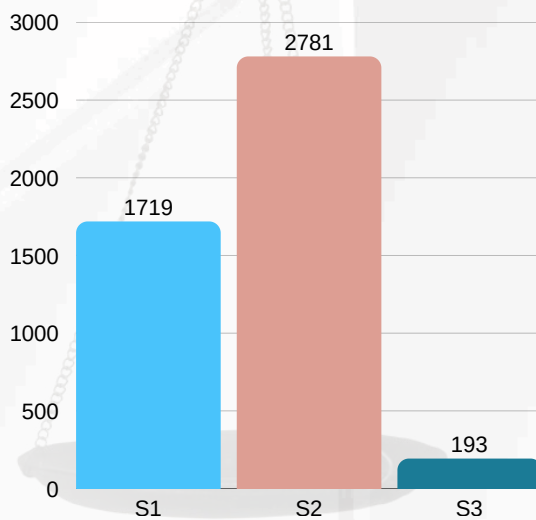
JUMLAH HAKIM



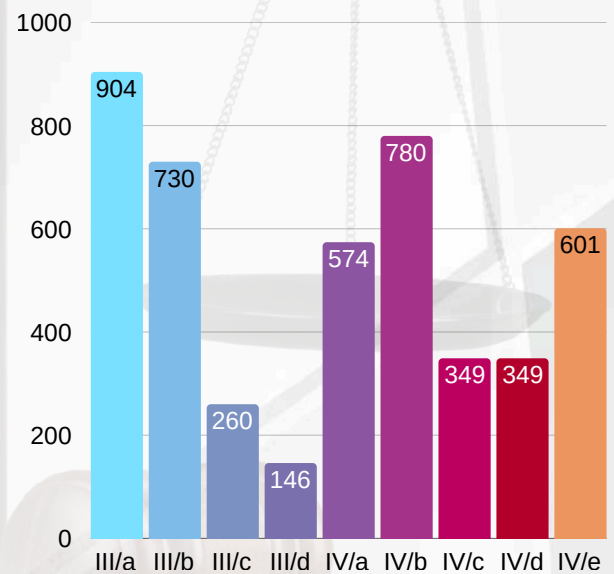
1.525

DATA HAKIM PENDIDIKAN DAN GOLONGAN

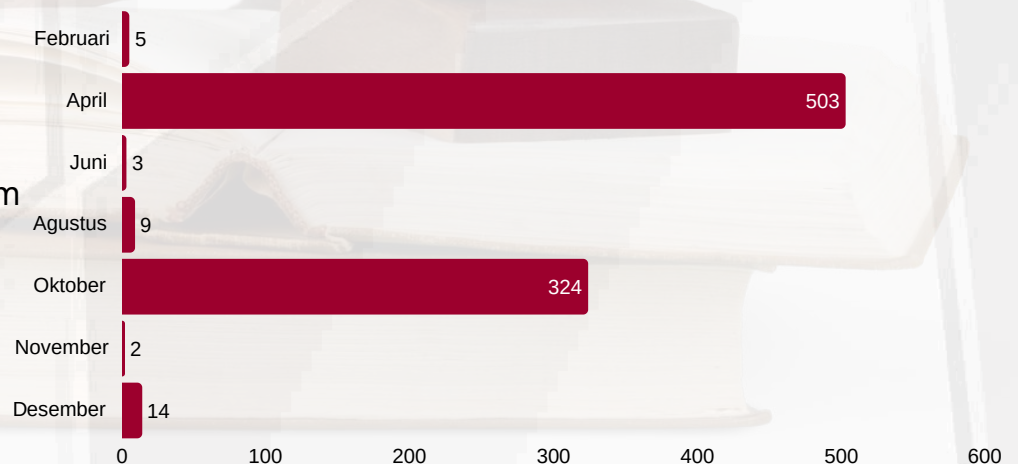
Pendidikan



Golongan

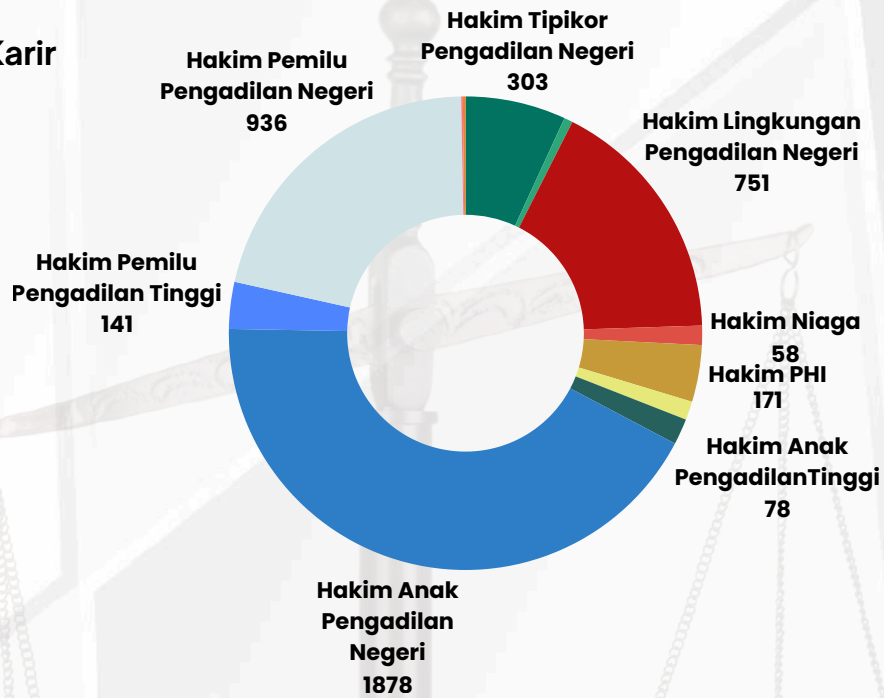


Kenaikan Pangkat Hakim

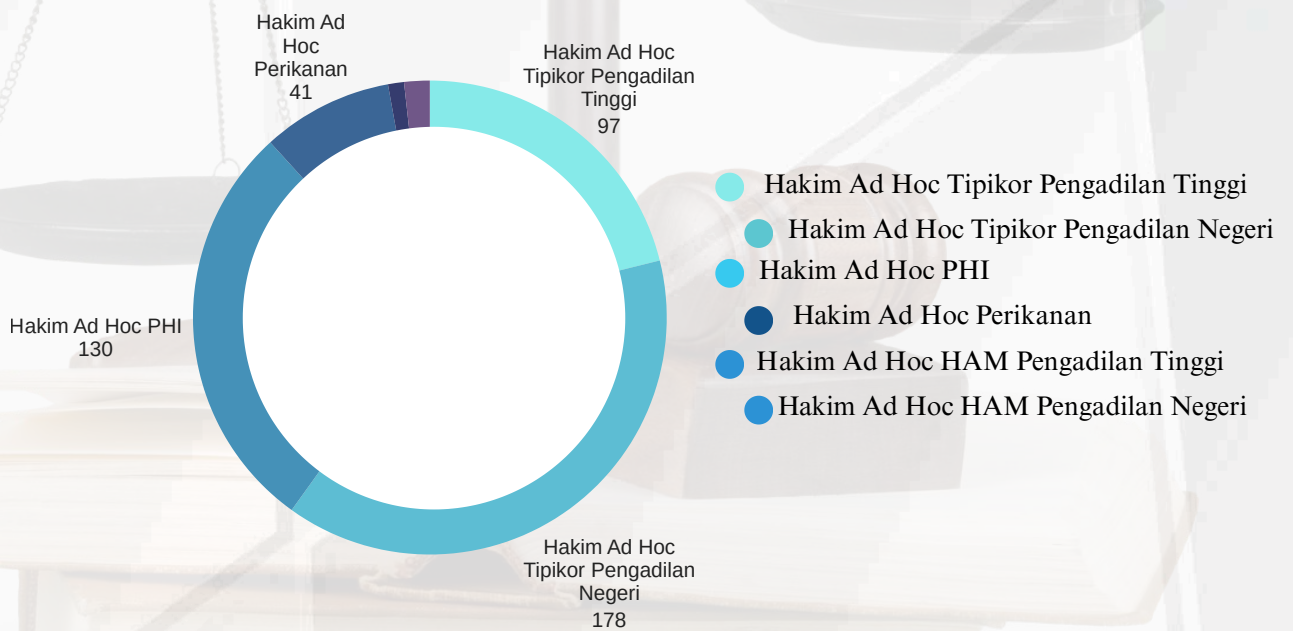


Jumlah Hakim Pengadilan

Hakim Karir

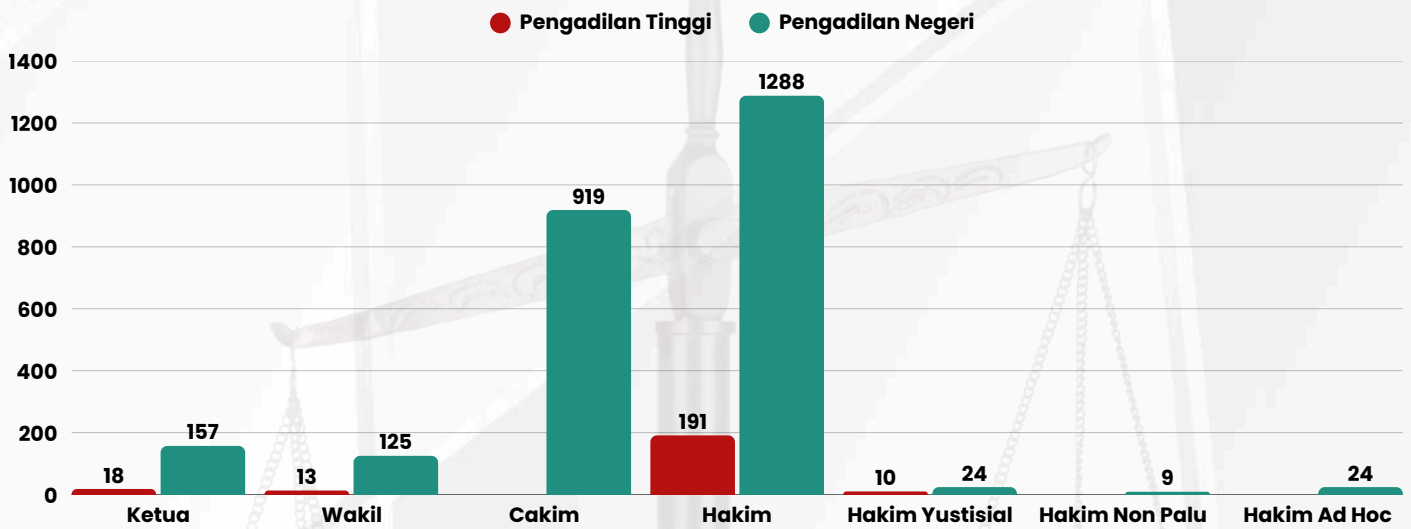


Hakim Ad Hoc

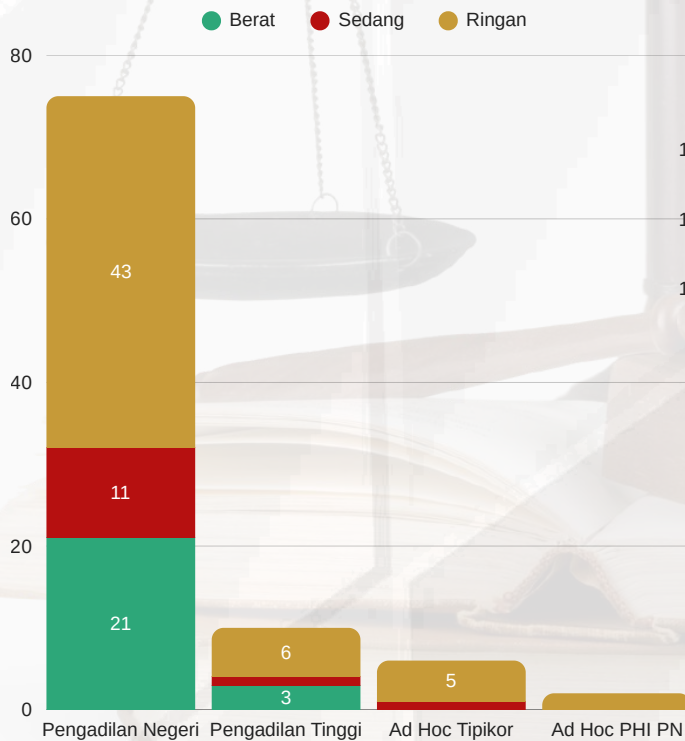


Promosi dan Mutasi Hakim Tahun 2025

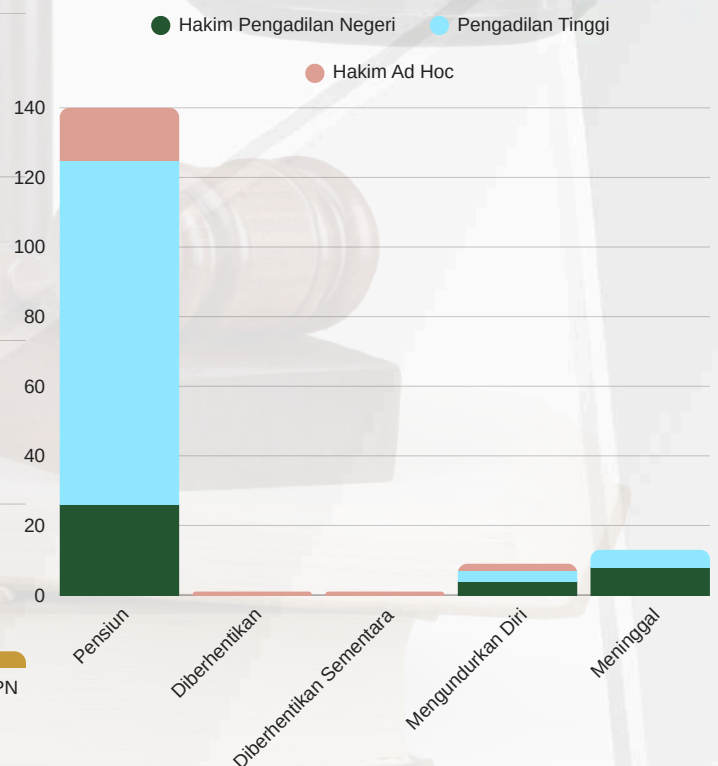
PROMOSI dan MUTASI



Hukuman Disiplin



Pensiun, diberhentikan dan Meninggal Dunia



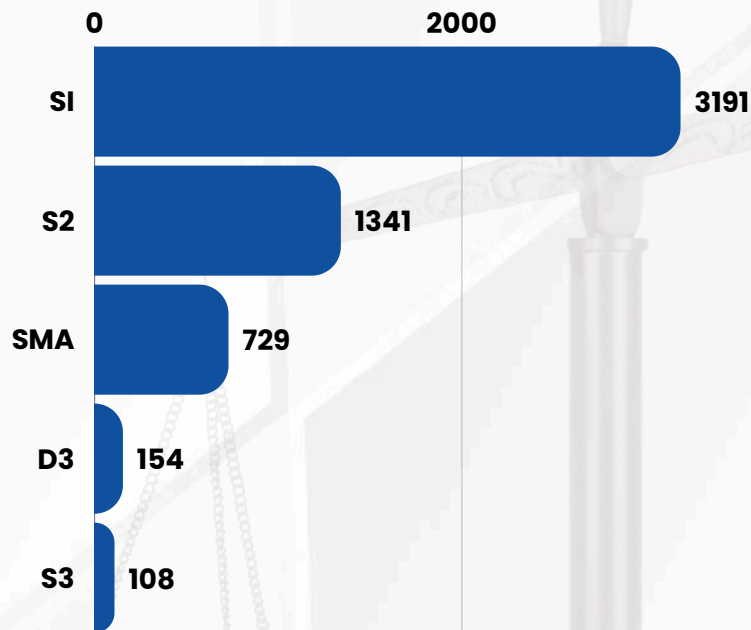
Rekapitulasi Kebutuhan Hakim

NO	Jenis/Kelas	Jumlah Satker	Jumlah Ideal	Jumlah Saat Ini	Kekurangan
1	Pengadilan Tinggi	34	736	663	185
2	Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus	15	669	532	152
3	Pengadilan Negeri Kelas IA	60	1.416	745	661
4	Pengadilan Negeri Kelas IB	126	1.842	1.169	685
5	Pengadilan Negeri Kelas II	181	1.924	1.584	372
Jumlah		416	6.587	4.693	2.055

Kepaniteraan Tahun 2025

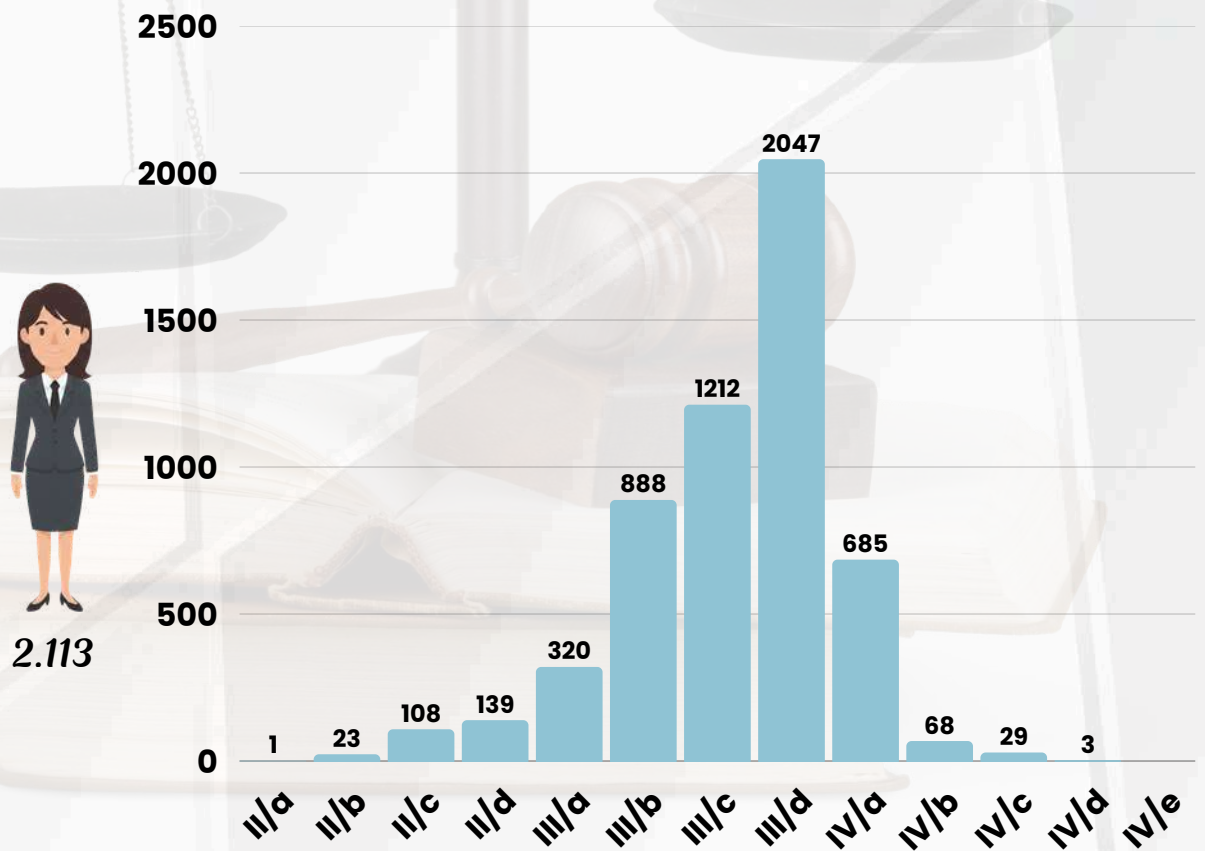
Data Panitera dan Jurusanita

Pendidikan



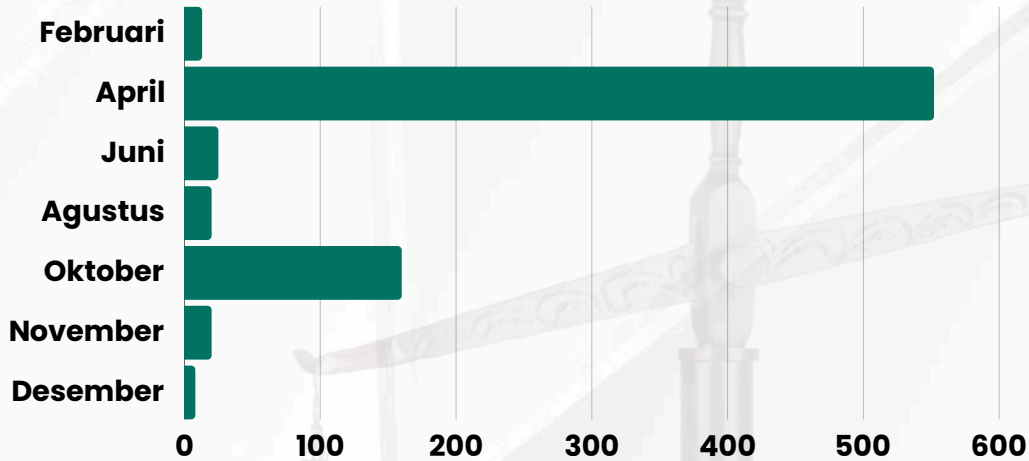
3.410

Golongan

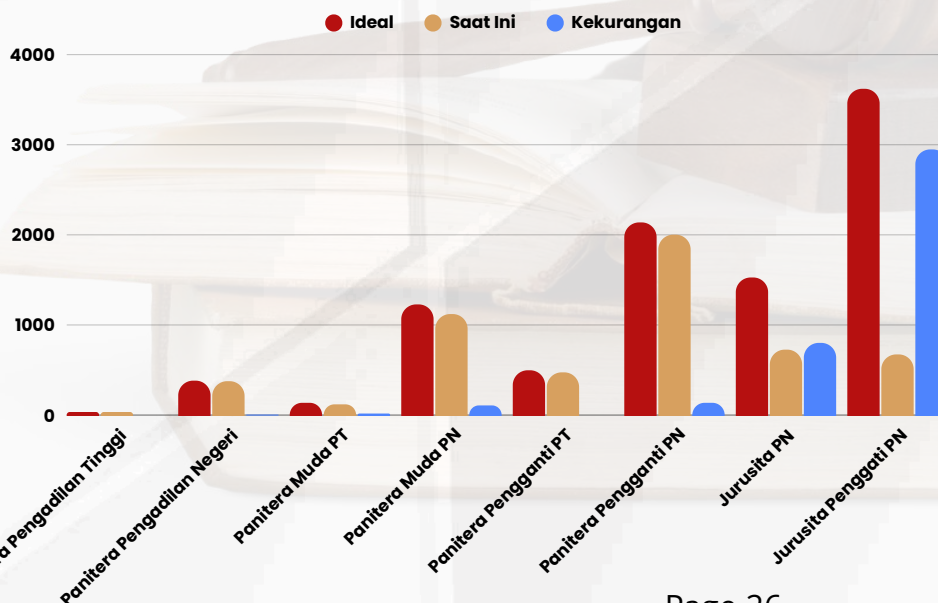
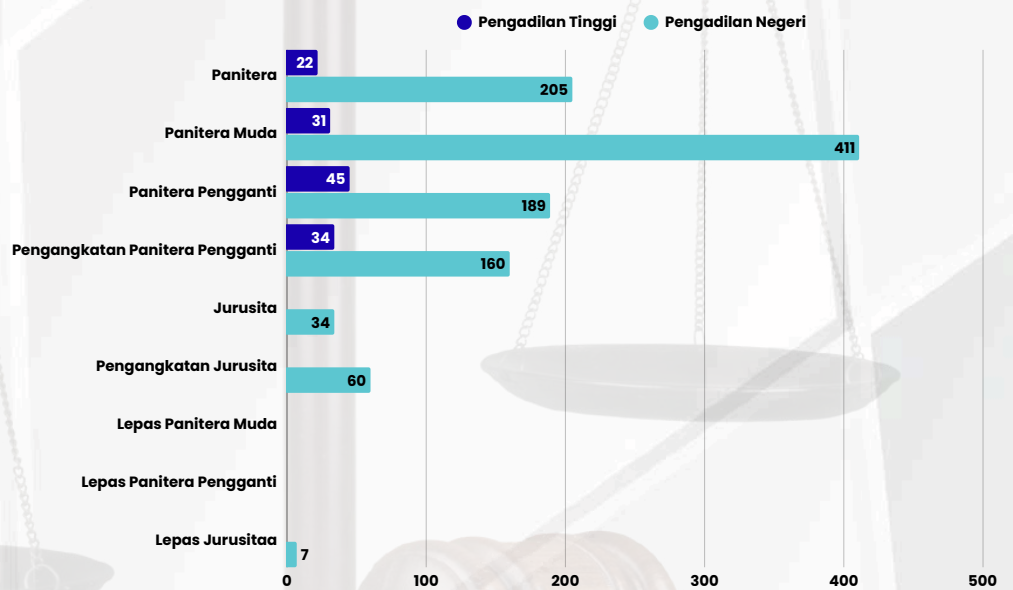


2.113

Kenaikan Pangkat Panitera

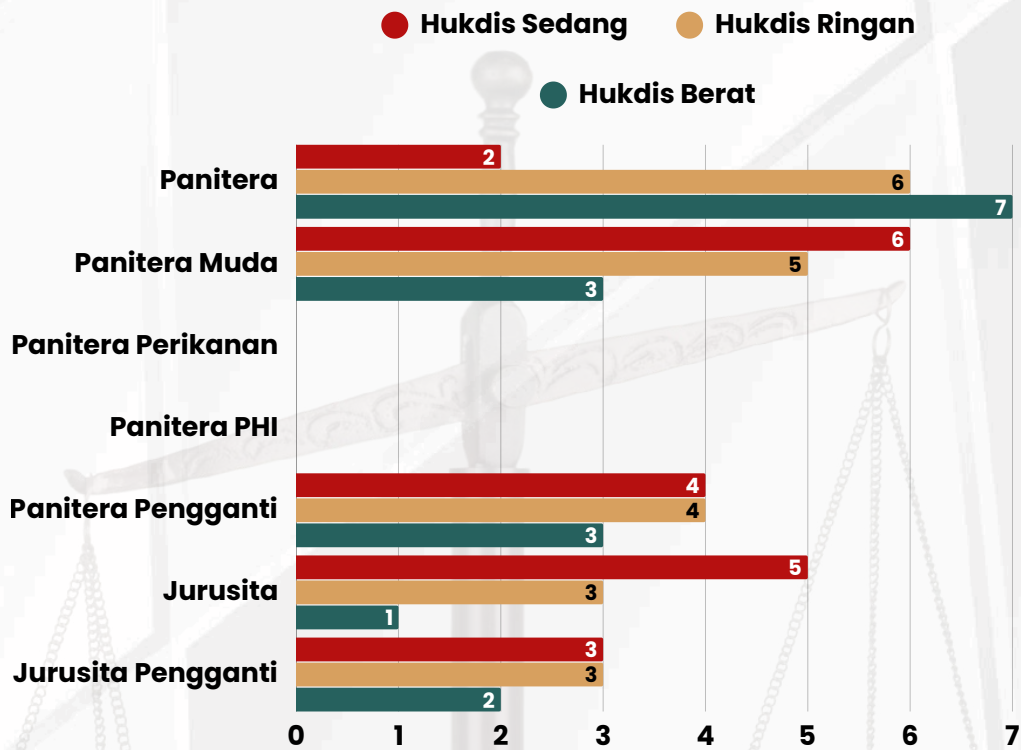


Promosi dan Mutasi Panitera

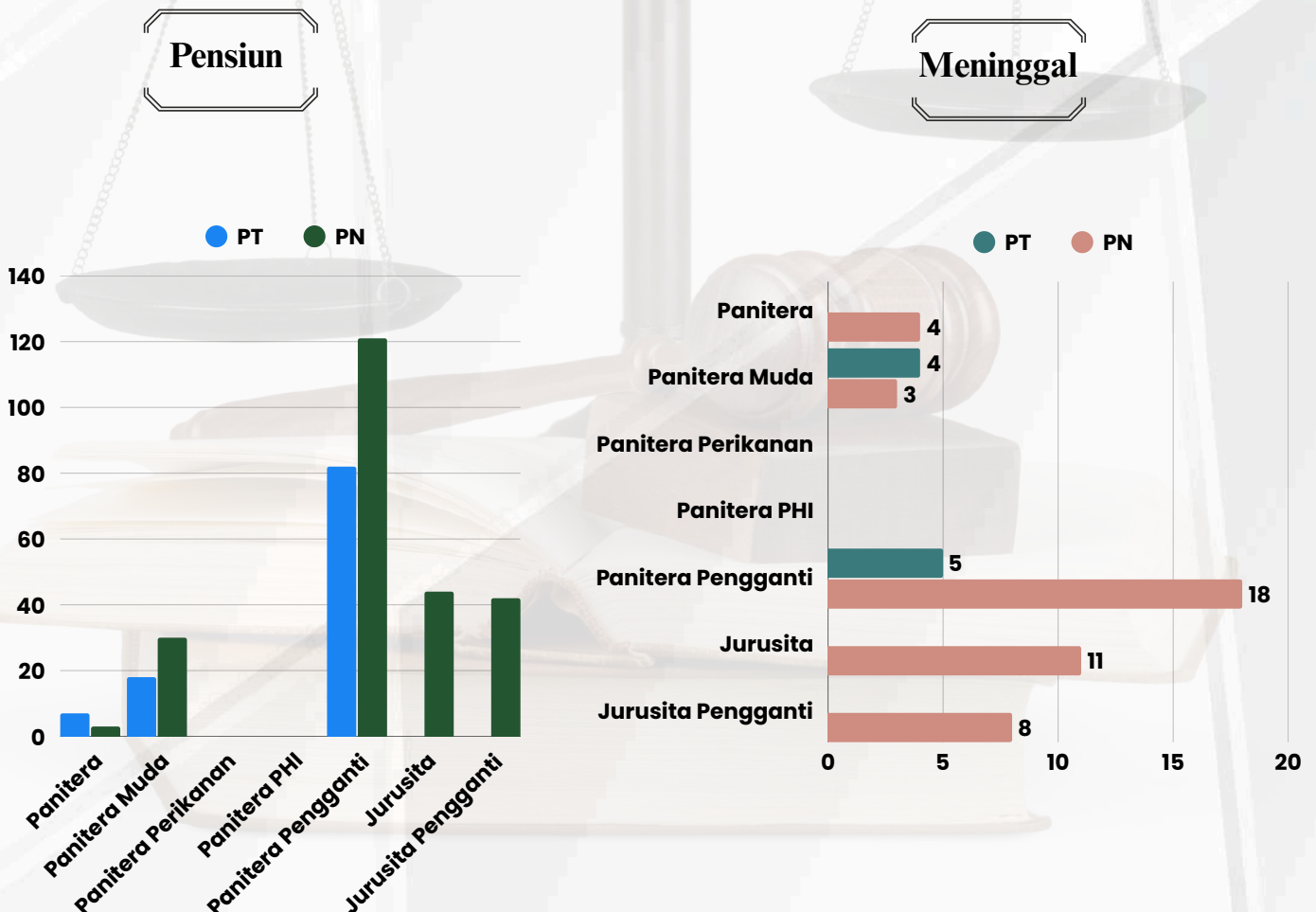


Rekapitulasi Kebutuhan Panitera dan Jurusita

Hukuman Disiplin Panitera Tahun 2025



Data Panitera Pensiun dan Meninggal



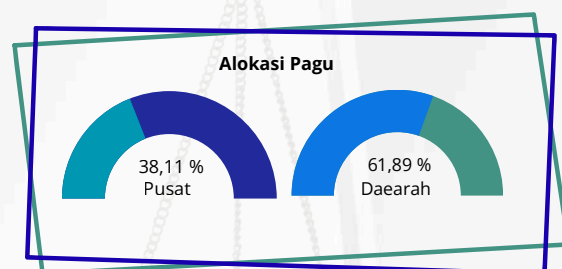
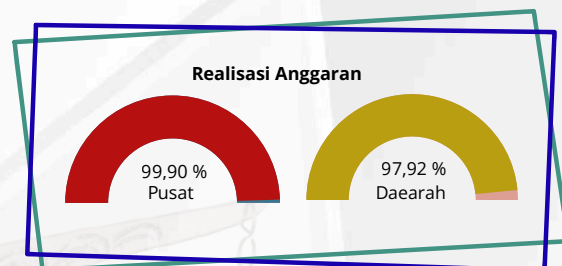
BAB IV

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN



Pengelolaan Keuangan

Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 tertuang dalam daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-005.03.1.097450/2025 tanggal 2 Desember 2024. Tahun Anggaran 2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat alokasi dana anggaran sebesar 128.272.021.000,- (Seratus dua puluh delapan Milyar dua ratus tujuh puluh dua juta dua puluh satu ribu). pagu tersebut dibagi ke 2 Program yaitu: Program Dukumen Manajemen Ditjen. BAdilum (pusat) sebesar 48.884.141.000,- dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (daerah) sebesar 79.387.880.000,-



Penyerapan Anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sejumlah 126.025.049.998,- dengan persentase sebesar 98,25 % dengan rincian untuk realisasi daerah sebesar 77.736.019.786,- dan untuk pusat sebesar 48.289.030.212,-, berikut secara detail rincian realisasi anggaran DIPA 03 Ditjen. Badilum:

Realisasi Anggaran Program penegakan dan Pelayanan Hukum

Realisasi Anggaran Program penegakan dan Pelayanan Hukum besar Anggaran yang diterima oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 78.419.118.263,- atau 97%,-

KEGIATAN	Alokasi	Realisasi	Presentase (Capaian)
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Daerah)	79.387.880.000,-	77.736.019.786	97.92 %
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Pusat)	5.760.000,-	5.754.500,-	99,90 %
1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	1.226.675.000,-	677.343.977,-	55,22 %
Jumlah	80.620.315.000,-	78.419.118.263,-	97,27 %

Laporan Keuangan

Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Anggaran yang diterima oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 47.605.931.735,- atau 99,90%

KEGIATAN	Alokasi	Realisasi	Presentase (Capaian)
6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum)	42.356.216.000,-	42.321.618.143	99,92%
6627. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum.	3.463.041.000,-	3.459.090.526,-	99,89%
6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	1.832.449.000,-	1.825.223.066,-	99,61%
Jumlah	47.651.706.000,-	47.605.931.735,-	99,90%

SARANA DAN PRASARANA

Kendaraan Dinas

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
		Rusak Berat	Rusak Ringan	Baik
Roda 6	5	0	0	5
Roda 4	12	0	0	12
Roda 2	21	0	7	14



Pengelolaan Tanah

sarana dan Prasarana Tanah yang di kelola oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sejumlah 25 buah dengan total luas tanah 39.379

Pengelolaan Tanah

	Golongan	Type	Jumlah
Bangunan Gedung Tempat Ibadah			1
Rumah Negara Permanen	I	B	3
	I	C	23
	II	B	4
	II	C	14
	II	D	14

SARANA, PRASARANA DAN INFORMASI TEKNOLOGI

Peralatan dan Mesin

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan Peralatan Mesin dengan jenis peralatan Mesin absesi sebanyak 7 buah, server sebanyak 14 buah, rak server sebanyak 6 buah, filling kabinet besi sebanyak 109 buah, lemari besi sebanyak 130 buah, kursi besi/ metal sebanyak 583 buah, semua peralatan yang dijelaskan tersebut ber kondisi dengan baik sedangkan brankas sebanyak 9 dengan kondisi rusak ringan sebanyak 3 buah dan kondisi baik sebanyak 6 buah.

Pemeliharaan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2025 telah melakukan merenovasi rumah dinas sebanyak 2 Unit yang berlokasi di Cipinang dan Ampera.



Persuratan



Surat Masuk 10.860

Surat Keluar 3.418

Penomoran Surat

Surat Edaran 9

Memorandum 234

SK Pengadaan Barang/Jasa 891

Surat Pengadaan Barang/Jasa 144

Surat Biasa 5.864

Surat Keputusan 1.928

ST, Undangan, Surat Perintah 1.421



Indeks Kepuasan Masyarakat

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada ruang PTSP atau pada laman web e-survei Direktorat Jenderal Badan Peradilan

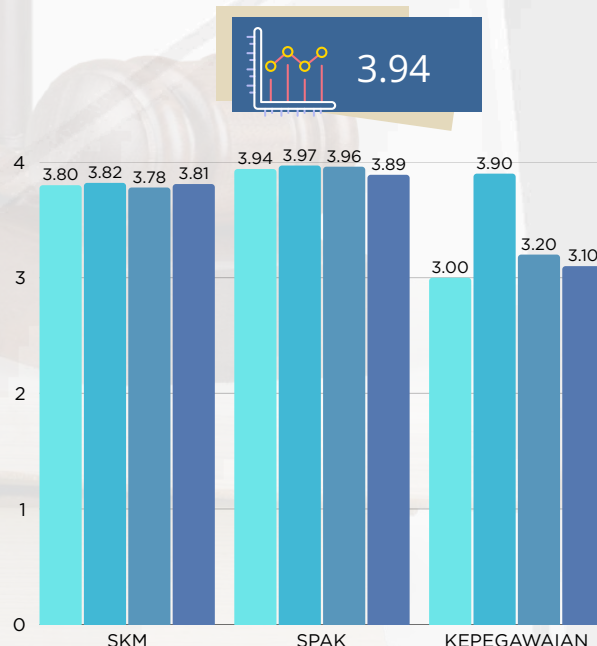
Umum (Si-Super) diakses secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui

<https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>. Jenis layanan yang di berikan pada Pengadilan Tingkat Banding ada 3 Layanan : Layanan Kesekretariatan, Layanan Kepaniteraan, dan Layanan E-court.

pada Pengadilan Tinggi Pertama terdapat 10 layanan yaitu : Layanan e-court, layanan Kepaniteraan Perdata, Layanan Kepaniteraan Pidana, Layanan Kepaniteraan Perikanan, Layanan Kepaniteraan Hukum, Layanan Kepaniteraan Niaga, Layanan Kepaniteraan Tipikor, Layanan Kepaniteraan PHI, Layanan Inzage dan Layanan Tata Usaha dan Keuangan.

JENIS LAYANAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
Jumlah Responden	68.368	64.004	74.262	64.811
Survey Kepuasan Masyarakat	3.90	3.90	3.91	3.91
Survey Persepsi Anti Korupsi	3.94	3.93	3.95	3.96

Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SI-SUPER) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dari hasil survey Nilai Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2025 melalui survei terhadap 64.881 responden adalah sebesar 3.94.



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



Untuk Memudahkan pelayanan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tanggal 24 Juli 2025 yang terletak di Lantai 3 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan langsung dan transparan.



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu bentuk komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam memberikan pelayanan informasi dan administrasi kepada masyarakat secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Sepanjang tahun pelaporan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi pusat layanan utama bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengajukan berbagai permohonan pelayanan sesuai kebutuhan para pihak.

Data Pelayanan Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menunjukkan bahwa selama periode pelaporan tahun 2025, jumlah permohonan informasi yang diterima mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi dan kemudahan akses layanan. Jenis informasi yang paling banyak dimohonkan meliputi informasi prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, jadwal layanan, serta informasi terkait produk layanan pengadilan.

Jumlah data pengguna layanan meja informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan badan peradilan yang berada di bawahnya selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

INFORMASI	JUMLAH LAYANAN		TRIWULAN II	
	2024		2025	
Layanan Informasi Badan Peradilan Umum	164.046		181.252	



Pada peringatan hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke - 80, Ketua Mahkamah Agung juga meresmikan beberapa aplikasi di lingkungan Mahkamah Agung RI, dimana ada 4 (empat) aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Berikut aplikasi yang diresmikan tersebut antara lain:

Pembangunan Aplikasi



1. Smart-TPM terobosan digital yang menghadirkan kemudahan, akurasi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan promosi dan mutasi

2. Badilum Learning Center (BLC) aplikasi digital yang dirancang oleh Badan Peradilan Umum sebagai Pusat Pengembangan Kompetensi terpadu bagi aparat peradilan, pengguna dapat mengakses sebagai modul e-learning, materi pelatihan, video pembelajaran, panduan teknis serta fitur evaluasi untuk mendukung proses belajar yang sistematis dan berkelanjutan



RUANG TAMU VIRTUAL

3. Ruang Tamu Virtual (RTV), sebuah platform daring yang dirancang untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antara hakim serta tenaga teknis di Lingkungan Peradilan Umum dan sebagai layanan administrasi dapat diselesaikan tanpa perlu melakukan kunjungan secara fisik ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Pembangunan Aplikasi

4. Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi (Simetri), aplikasi persuratan dan tata naskah dinas secara digital di seluruh Lingkungan Peradilan Umum (Badilum), untuk meningkatkan efisien, transparan dan modernisasi pelayanan perdilan menuju peradilan berbasis digital.



Dan terdapat 4 (empat) aplikasi baru yang diluncurkan pada saat kegiatan Abhinaya Upangga yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2025 yang dilakukan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Yudisial dan Non Yudisial dan Dirjen. Badilum, aplikasi tersebut antara lain:

1. Persidangan Tepat Waktu dan Humanis (Patuh), aplikasi ini menekankan pada penguatan manajemen kinerja persidangan, melalui pelayanan persidangan yang lebih transparan, cepat dan akuntabel. Hal ini selaras dengan arah kebijakan modernisasi peradilan yang menekankan digitalisasi dan efisiensi progres kerja.

2. Emphati, aplikasi yang merespon dengan cepat terkait saran, kritik dan keluhan terkait kualitas layanan di seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Serta mampu memonitoring tindak lanjut keluhan secara transparan dan realtime melalui Kode Tracking.



3. e-Bimantara, aplikasi yang menjawab kendala proses pengurusan biaya pindah tenaga teknis di Lingkungan Peradilan Umum yang masih melakukan secara manual serta sering kali memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan administrasi.



4. e-Eksaminasi, Merupakan wujud digital dari proses pengukuran putusan yang berkualitas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 1967. melalui eksaminasi putusan secara elektronik, hakim karir tingkat pertama menyediakan dua putusan (pidana dan perdata) yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilakukan penilaian oleh hakim tinggi pengawas daerah pada masing-masing wilayah tingkat banding. Hasil penilaian dari e-eksaminasi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dapat dipergunakan sebagai salah satu nilai dari rapor hakim sehingga menjadikan putusan berkualitas adalah cerminan hakim berintegritas.

Abhinaya Upangga Wisesa

Penghargaan Kinerja yang di mulai pada tahun 2023 Oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menilai Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum dengan tujuan mewujudkan pengadilan yang berintegritas dan bermartabat dan pelayanan Publik serta meningkatkan kinerja pada Satuan kerja di Lingkungan Peradilan Umum. Penghargaannya berupa Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Penilaian Kinerja (AMPUH).



Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh yang biasa disingkat dengan AMPUH adalah Penilaian yang dilakukan Oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dibentuk pada Tahun 2014. Penilaian Ampuh berupa Administrasi Umum, Pelayanan Publik, Pengelolaan Kas, Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengawasan dan Penanganan Pengaduan.

Penghargaan Tahun 2025 memiliki kualifikasi unggul dengan batas nilai 850-1000 untuk Pengadilan Tinggi sebanyak 27 Pengadilan, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus dan IA dengan nilai 825 - 900 sebanyak 75 Pengadilan, sedangkan untuk Pengadilan Negeri Kelas IB dan II dengan Nilai 800 - 850 sebanyak 307 Pengadilan.

Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja yang dilakukan pada akhir tahun oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang terdiri atas penilaian :

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara;
3. Keterbukaan Informasi;
4. Pelaksanaan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu;
5. Role Model; dan
6. Hakim Tinggi Pengawas Daerah



Juara Umum Abhinaya
Upangga Wisesa Tahun 2025
Pengadilan Tinggi Riau

BAB VI PENGAWASAN



A. Internal

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan Pembinaan yang dilakukan ke Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, pembinaan dilaksanakan dengan tujuan untuk menegakkan dan meningkatkan Integritas, Disiplin Kerja, dan Kode Etik dalam Kinerja. Dalam Pembinaan tersebut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan pembinaan dilakukan secara luring maupun daring melalui SAPA Pengadilan.

Pembinaan tersebut dilakukan berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dan PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga melakukan Pengawasan jalannya layanan publik pada satuan kerja melalui CCTV terpusat pada Command Center Ditjen. Badilum.



B. Evaluasi

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tidak hanya melakukan pembinaan terhadap satuan kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dibawahnya. berdasarkan evaluasi capaian kinerja saat ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat rencana aksi strategis yang akan di jalankan dalam periode mendatang, salah satunya peningkatan kinerja terhadap penyelesaian perkara, antara lain :

- 1.penguatan sistem informasi pengadilan yang memungkinkan pimpinan pengadilan memantau setiap jalannya perkara;
- 2.penyempurnaan SOP Penanganan Perkara dengan adanya Kebijakan dan aturan baru berlaku;
- 3.peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM dengan penyelenggarakan pelatihan berkelanjutan dan penguatan koordinasi lintas instansi di bidang hukum untuk mendukung proses penyelesaian perkara.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berkomitmen penuh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam rangka memberikan gambaran transparan, konkrit dan memiliki dampak terkait dengan kinerja maupun capaian dari instansi, sehingga melakukan tindaklanjut dari hasil TLHE sesuai dengan surat SEKMA Nomor 1282/2023 dan di teruskan ke Badan Pengawasan Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1907/DJU.1/OT1.6/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025, dan melakukan:

- 1.Koordinasi dengan stakeholder terkait implementasi dan pengelolaan dokumen Sakip;
- 2.Penguatan Sakip pada lingkup Ditjen Badilum dan satuan Kerja dibawahnya;
- 3.Monitoring dan evaluasi data kinerja secara berkala dilingkungan Ditjen Badilum;
- 4.Pengembangan Aplikasi monev kinerja sesuai dengan Restra 2025-2026.

Selain itu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum juga melaksanakan evaluasi pembangunan Zona Integritas untuk menilai efektivitas penerapan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta peningkatan integritas SDM, peningkatan kinerja organisasi dan perwujudan pelayanan publik yang berkualitas dengan metode dan indikator yang terukur. Sepanjang tahun, evaluasi dilakukan melalui monitoring internal, self-assessment, dan pengukuran capaian indikator kinerja ZI. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan komitmen satuan kerja dalam penerapan pembangunan Zona Integritas yang tahun sebelumnya satker yang meraih predikat WBK hanya 1 (satu) satker pada tahun 2025 meraih predikat WBK sebanyak 7 (tujuh) satuan kerja, yaitu: Pengadilan Tinggi Makassar, Pengadilan Negeri Bangli, Pengadilan Negeri Bengkalis, Pengadilan Negeri Marabahan, Pengadilan Negeri Purwakarta, Pengadilan Negeri Sekayu dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.



BAB VII PENUTUP

MAHKAMAH AGUNG

KESIMPULAN

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam membangun badan peradilan yang agung, modern, dan terpercaya. Seluruh rangkaian kegiatan dan kebijakan strategis telah dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target output, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan peradilan, penguatan tata kelola organisasi, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabilitas kinerja, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Bahwa capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Peningkatan kualitas pelayanan peradilan, optimalisasi administrasi perkara, penguatan pengawasan internal, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya kinerja organisasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi belanja telah dilaksanakan secara tertib dan tepat sasaran. Pengendalian internal dan mekanisme monitoring serta evaluasi berjalan secara berkesinambungan guna memastikan setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi yang baik antara unit kerja di lingkungan peradilan umum, dukungan kepemimpinan yang konsisten, serta komitmen aparatur dalam menjaga integritas dan profesionalisme. Selain itu, dinamika pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan juga memberikan pembelajaran penting, terutama dalam menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kebutuhan terhadap perkembangan regulasi, serta tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan transparan. Hal ini menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran penting untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 telah mencerminkan komitmen kuat untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam rangka mewujudkan peradilan umum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima. Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, refleksi, dan dasar perumusan kebijakan serta strategi peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang, demi terwujudnya sistem peradilan umum yang semakin berkualitas, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

REKOMENDASI

Sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum perlu menyusun rekomendasi strategis yang menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan kinerja di masa mendatang secara konsisten dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja organisasi diantaranya adalah :

1. Memberikan reward and punishment kepada satuan kerja dibawahnya atas kinerja yang dicapai melalui Abhinaya Upangga Wisesa;
2. Perlu dilakukan penguatan sistem informasi digital menyesuaikan regulasi kebijakan yang berlaku dalam rangka percepatan penyelesaian perkara dan layanan pengadilan ;
3. Memberikan pembinaan secara hybrid baik internal dan eksternal kepada satuan kerja dibawahnya;
4. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Badilum dengan Sekretariat Mahkamah Agung, Satuan Kerja Pengadilan serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Badilum;
5. Optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai penguatan mekanisme pengendalian internal ;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas berkelanjutan dengan Program pembinaan, pelatihan, Bimbingan teknis serta penguatan integritas aparatur peradilan perlu dilakukan guna menjawab tantangan kompleksitas perkara dan perkembangan regulasi. Kompetensi teknis, manajerial, serta etika profesi harus berjalan seiring dalam mendukung profesionalisme aparatur peradilan.